

PENGARUH DAMPAK BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN WERTAMRIAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Yoseph Fawanmele¹, Ferly Agustina Sairmaly², Luther Batkunde³
yosephfawanmele1302@gmail.com¹, ferlyasairmaly@gmail.com², batkundeluther91@gmail.com³

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Lelemuku Saumlaki

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear sederhana, serta uji t dan uji F untuk mengetahui pengaruh PKH terhadap kondisi keluarga miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Wertamrian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $2,475$ lebih besar dari t tabel $1,660$ dan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$. Uji F menghasilkan $6,125 > 3,937$ dengan R^2 sebesar $0,459$, yang berarti PKH memberikan kontribusi sebesar $45,90\%$ terhadap perubahan kondisi keluarga miskin. Meskipun demikian, bantuan yang diterima sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan, belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif.

Kesimpulannya, Program Keluarga Harapan memiliki peranan penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, namun diperlukan pendampingan lebih lanjut agar bantuan dapat dikelola secara produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Kata Kunci: **Program Keluarga Harapan, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat**

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang senantiasa dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak masa penjajahan hingga saat ini. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dari waktu ke waktu, kenyataannya persoalan kemiskinan masih menjadi masalah kompleks yang sulit dituntaskan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik struktural, kultural, maupun geografis, yang mengakibatkan sebagian masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar permasalahan ekonomi, tetapi juga persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program kerja. Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program perlindungan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Sasaran utama PKH adalah keluarga miskin dengan anggota rumah tangga yang memiliki ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan bantuan tunai bersyarat ini, pemerintah berharap keluarga penerima manfaat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain PKH, pemerintah juga meluncurkan program lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), serta Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS). Semua program tersebut merupakan implementasi dari *Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, yang menekankan pentingnya perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi.

Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah krusial. Hal ini ditandai dengan masih adanya ketimpangan antarwilayah, ketidakmerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan lapangan kerja yang menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan. Faktor sosial-budaya seperti rendahnya motivasi untuk bersekolah, ketergantungan pada sektor informal, serta budaya konsumtif juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Pendapatan masyarakat di Kecamatan Wertambrian pada umumnya masih sangat rendah dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan perikanan yang sangat bergantung pada musim dan kondisi alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, pendapatan rata-rata keluarga per bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1**Pendapatan Keluarga Setiap Desa di Kecamatan Wertambrian**

No	Nama Desa	Besar Pendapatan/Bulan
1	Tumbur	Rp 300.000 – Rp 500.000
2	Lorulun	Rp 400.000 – Rp.500.000
3	Atubul Da	Rp 350.000 – Rp 500.000
4	Atubul Dol	Rp 400.000 – Rp.500.000
5	Amdasa	Rp 300.000 – Rp 500.000
6	Sangliat Dol	Rp 400.000 – Rp 500.000
7	Sangliat Krawain	Rp 300.000 – Rp 500.000
8	Arui Bab	Rp 300.000 – Rp 500.000
9	Arui Das	Rp 300.000 – Rp 500.000

Sumber:Olahan data Kuisoner (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan rata-rata keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berada pada kisaran Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan, jumlah ini jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan Pengertian Kemiskinan

Menurut Bappenas (2015), kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, yang diukur dari tingkat pengeluaran. Definisi ini menekankan pada aspek ekonomi, khususnya konsumsi masyarakat yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan.

Sementara itu, Todaro (2006) memandang kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kemiskinan bersifat multidimensional, karena melibatkan berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan dan tidak dapat hanya dilihat dari sisi finansial semata.

Menurut Abhijit Banerjee (2002), kemiskinan memiliki banyak dimensi dan perumusan definisinya merupakan hal yang problematis baik secara konseptual maupun praktis. Siapa yang dapat disebut miskin bergantung pada standar yang digunakan, dan pada kenyataannya masyarakat miskin umumnya memiliki akses terbatas terhadap pasar, kualitas infrastruktur, serta sumber daya produktif lainnya.

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi kemiskinan merupakan sesuatu yang problematik pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin, serta banyak hal tentang kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki akses pasar dan kwalitas infrastruktur yang terbatas (Abhijit Banerjee, 2002).

Kemiskinan juga membawa konsekuensi serius, antara lain keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa putus sekolah, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian berpengaruh pada tingginya angka pengangguran dan tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, kemiskinan dan rendahnya pendidikan membentuk lingkaran setan (vicious cycle) yang sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat.

Menurut Niemietz (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Definisi ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (2016) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Lebih lanjut, Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Hal ini mempertegas bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan pendapatan, melainkan kondisi di mana seseorang tidak dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Teori Pembagunan Ekonomi

Teori Pembangunan Ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Teori ini berfokus pada bagaimana negara atau masyarakat dapat mencapai peningkatan kesejahteraan melalui perubahan struktural, peningkatan produktivitas, distribusi pendapatan yang lebih adil, investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan ekonomi yang efektif.

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkelanjutan dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks PKH, teori pembangunan ekonomi memberikan dasar untuk memahami bagaimana intervensi pemerintah seperti bantuan tunai bersyarat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengeluaran akibat akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan (World Bank, 2023).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan ekonomi.

Fokus utama teori pembangunan ekonomi meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi: Proses peningkatan output barang dan jasa di suatu negara.
2. Perubahan struktural: Perubahan dalam struktur ekonomi yang memungkinkan diversifikasi dan peningkatan produktivitas.
3. Pemerataan kesejahteraan: Mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi yang kaya dan miskin melalui redistribusi sumber daya.

Teori Pendapatan

Teori Pendapatan adalah teori dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana pendapatan dihasilkan dan didistribusikan dalam masyarakat. Pendapatan, dalam hal ini, mengacu pada semua jenis penghasilan yang diterima oleh individu atau kelompok sebagai imbalan atas tenaga kerja, modal, atau sumber daya lainnya yang mereka miliki. Teori ini menganalisis faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, struktur pasar tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Pendapatan merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi individu. PKH bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara tidak langsung melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang bersyarat. Studi oleh Nugraha et al. (2023) menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan daya beli penerima manfaat di Indonesia, yang berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan di tingkat lokal.

Fokus utama teori pendapatan meliputi:

1. Pendapatan faktor produksi: Penghasilan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja (upah), modal (bunga atau dividen), dan tanah (sewa).
2. Distribusi pendapatan: Proses bagaimana pendapatan dibagi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

3. Pendapatan per kapita: Ukuran pendapatan rata-rata yang diterima oleh individu dalam suatu negara atau wilayah, yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi.

Secara singkat, Teori Pembangunan Ekonomi berkaitan dengan upaya menciptakan dan meningkatkan kondisi ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat secara keseluruhan, sementara Teori Pendapatan lebih berfokus pada cara pendapatan dihasilkan dan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Pengertian Keluarga Harapan dalam Konteks Ekonomi

Keluarga harapan dapat dipahami sebagai suatu konsep tentang unit terkecil dalam masyarakat (keluarga) yang diproyeksikan memiliki kemampuan, daya tahan, dan prospek lebih baik di masa depan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsumen, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang berperan dalam produksi, distribusi, dan investasi sumber daya manusia.

Konsep ini sering dikaitkan dengan *Program Keluarga Harapan (PKH)* di Indonesia, yakni program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan keluarga miskin. Namun, secara lebih luas, “keluarga harapan” dapat dimaknai sebagai keluarga yang memiliki visi ekonomi berkelanjutan, yang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kesejahteraan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adalah dengan mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Arikunto (2006) tentang sifat umum penelitian kuantitatif, antara lain: (a) kejelasan unsur: tujuan, subjek, sumber data sudah mantap, dan rinci sejak awal, (b) dapat menggunakan sampel, (c) kejelasan desain penelitian, dan (d) analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Arikunto (2006) juga menambahkan, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan jenis pendekatan penelitian yaitu: waktu dan dana yang tersedia, dan minat peneliti.

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang sebab akibat. Artinya, variasi pada X (variabel bebas) akan mempengaruhi variasi pada Y (variabel terikat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel (Y). analisi ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dari data penelitian, maka didapat hasil pengolahan data dengan program SPSS 26, yang tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,243 ^a	,459	,495	1,271

a. Predictors: (Constant), Program keluarga harapan (X)

Sumber : Data di olah Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka r square 0,459 dengan presentase 45,90 % dimana 45,90 % dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini yakni Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin (Y) sedangkan 54,10 % di pengaruh oleh variabel diluar penelitian ini.

Tabel 4.8
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,896	1	9,896	6,125	,015 ^b
	Residual	158,344	98	1,616		
	Total	168,240	99			

a. Dependent Variable: Keluarga Mikin (Y)

b. Predictors: (Constant), Program keluarga harapan (X)

Sumber: Data di olah Tahun 2025

Dari tabel 4.8 diatas maka pengujian Program Keluarga Harapan (X) terhadap Keluarga Kemiskinan (Y) berpengaruh secara parsial dengan rumus jia f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} dengan nilai sig 0,15 lebih kecil dari 0,05 dengan hasil uji $f = 6.125 > 3,937$ dimana di nyatakan ada pengaruh secara signifikan antara variabel X terhadap variabel Y

Tabel 4.9
Hasil Olah Data Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,062	1,500		8,710	,000
	Program keluarga harapan (X)	,235	,095	,243	2,475	,015

a. Dependent Variable: Keluarga Mikin (Y)

Sumber Data Diolah Tahun 2025

Pada tabel 4.9 nilai constant (a) adalah 13.062 sedangkan nilai Program Keluarga Harapan (X) adalah 0,235. Maka persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = a + bX$ atau ($Y = 13,062 + 0,235X$)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kontribusi Budidaya Rumput Laut Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Kamatubun, Kacamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Budidaya rumput laut memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Kamatubun. Model regresi menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 27%.

2. Pendapatan petani rumput laut di Desa Kamatubun cukup beragam dengan rata-rata pendapatan tahunan yang mengentuh angkah sebesar Rp. 64.411.765. Model ini signifikan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kamatubun.
3. Aktivitas budidaya rumput laut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kamatubun atau menjadi sumber penghasilan alternatif yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Dukungan terhadap budidaya rumput laut melalui pelatihan teknik, akses modal, dan pemasaran perlu ditingkatkan guna menjaga dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

Hasil Analisis Pembahasan

Setelah meakukan hasil uji analisis maka hipotesis yang diperoleh pada penelitian ini adalah variabel Program Keluarga Harapan berpengaruh secara signifikan terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Wertamprian dimana dari hasil uji analisis Program Keluarga Harapan dan Varibel Keluarga Miskin dalam pengujian Uji T nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel} = 2,475$ lebih besar dari $t_{tabel} 1,660$, dan Uji $F = 6.125 > 3,937$ dengan nilai signifikan $0,015 < 0,05$, dengan nilai r^2 0,459 dengan presentase 45,90 %. Setalah melakukan perbandingan dari peneliti terdahulu maka Harwidianyah, menunjukkan bahwa di mata masyarakat uang BLT dinilai hanya sebagai uang pembelian sembako, uang yang diberikan. Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu fokus pemberian BLT untuk penanggulangan ekonomi masyarakat, sedangkan Tri Wardani, melihat Dampak Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Terhadap Aktivitas masyarakat, Sidoarj melihat bantuan langsung tunai terhadap konsumsi rumah tangga dan produksi rumah tangga tidak berpengaruh secara nyata (tidak signifikan).sedangkan Dian Marini meneliti Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian terhadap dampak bantuan langsung tunai. Perbedaannya yaitu peneliti Dian Marini meneliti tentang dampak bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin sedangkan penulis meneliti tentang dampak bantuan langsung tunai. Perbedaan pada peneltian ini adalah dimana Peneltian ini pada hasi peneltisn berpengaruh secara signifikan Program Keluarga harapan terhadap Keluarga miskin.

Kesimpulan

Berasarkan peneltian diatas maka penulis menyimpulkan dari hasil penelitian terdapat Hipotesis yang diterima dHo ditolak Ha diterima dengan adanya pengaruh variabel Program Keluarga Harapan (X) terhadap Keluarga Miskin bila dilihat dari pengujian Uji t dan Uji F dimana pengujian lebih besar dari t dan f tabel dimana r^2 0,459 dengan presentase 45,90 %. Dengan pengujian validitas r tabel lebih besar dari r hitung dan uji Rabilitas data dengan cronbach's Alpha lebih dari 0,60 dari hasil penelitian tersebut ternyata Program Kelaura Harapan sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup baik makan, minum dan biaya pendidikan anak walaupun masyarakat tidak menggunakanannya sebagai modal usaha namun digunakan sebagai pemenuhan kebutuahn hidup lainnya.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis tertarik mengambil saran

1. Bantuan Sosial perlu di salurkan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, serta perlu adanya pengontrolan pemerintah.
2. Progan Keluarga Harapan perlu ada pelatihan agar bantuan yang dipapai tepat sasaran selain pemenuhan kebutuhan sehari-hari namun dapat digunakan untuk usaha arau digunakan sebagai modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhijit, B. (2002). *The economic lives of the poor*. MIT Press.
- Akib, H., et al. (2016). Efektivitas program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–60.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Profil kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Bappenas. (2005). *Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2015). *Laporan tahunan pembangunan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2023). *Laporan pembangunan dan kesejahteraan sosial*. Jakarta: Bappenas.
- Barrientos, A. (2022). *Social protection and poverty*. Routledge.
- Dian, M. (2019). Dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat miskin di Desa Parawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Sosiologi Riau*, 3(2), 45–58.
- Gans, H. J. (1972). The positive functions of poverty. *American Journal of Sociology*, 78(2), 275–289.
- Harwidiansyah. (2018). Dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Haryono, A., Nugraha, P., & Santoso, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(2), 113–129.
- Jones, T. H. (1985). *The economics of education*. McGraw-Hill.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Leleury, F., & Tomasouw, S. (2019). Analisis kemiskinan masyarakat pesisir di Maluku. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 5(1), 20–35.
- Lewis, A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *Manchester School of Economic and Social Studies*, 22(2), 139–191.
- Lewis, O. (1966). *La vida: A Puerto Rican family in the culture of poverty—San Juan and New York*. Random House.
- Maipita, I. (2014). *Pengukuran kemiskinan: Pendekatan ekonomi dan sosial*. Medan: USU Press.
- Myrdal, G. (1970). *The challenge of world poverty: A world anti-poverty program in outline*. Pantheon.
- Niemietz, K. (2011). *A new understanding of poverty*. Institute of Economic Affairs.
- Nugraha, D., Suryani, A., & Putra, B. (2023). Dampak PKH terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 14(1), 67–82.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Putnam, R. D. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Raditya, T. W. (2017). Dampak kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat terhadap aktivitas di Desa Keboan Amon Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”).
- Rawls, J. (2019). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Ribot, J., & Peluso, N. (2020). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2018). *Collective choice and social welfare* (Expanded ed.). Harvard University Press.
- Sugiyarto, G., et al. (2015). Kemiskinan di negara berkembang: Analisis multidimensi. *Jurnal*

- Ekonomi Sosial Humaniora, 7(3), 45–61.
- Syafruddin, M., Hasan, H., & Yusuf, A. (2021). Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 55–70.
- Titmuss, R. (2022). **Essays on the welfare state**. Policy Press.
- Todaro, M. P. (2006). **Economic development** (9th ed.). Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). **Economic development** (13th ed.). Pearson.
- United Nations Development Programme. (1997). **Human development report**. Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2023). **Human development report**. UNDP.
- Widianto, B. (2023). Modal sosial dalam implementasi PKH. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 5(1), 12–24.